

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah kemiskinan. Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan seringkali memunculkan kesenjangan ekonomi yang menjadi akar dari timbulnya masalah kemiskinan. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan, maka dampaknya dapat memperburuk situasi terhadap stabilitas sosial maupun politik. Permasalahan terkait ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sebenarnya tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi juga menjadi isu yang dihadapi oleh negara maju. Perbedaan utamanya terletak pada besaran tingkat kesenjangan serta jumlah penduduk miskin yang ada, di mana kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesulitan dalam menanggulangnya. Secara umum, semakin tinggi angka kemiskinan di suatu negara, maka semakin kompleks pula upaya yang dibutuhkan untuk mengatasinya.

Pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara karena peningkatannya secara tidak langsung berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang sering dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PDB per kapita, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Agar kesejahteraan ini terus meningkat, pertumbuhan ekonomi harus mampu melampaui laju pertumbuhan penduduk. Misalnya, jika pertumbuhan penduduk mencapai dua persen per tahun, maka pertumbuhan PDB perlu berada di atas angka tersebut agar tidak terjadi stagnasi ekonomi (BPS, 2025).

Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja. Manusia merupakan faktor produksi yang penting dalam proses ekonomi, sehingga ketika produksi meningkat, kebutuhan tenaga kerja juga akan meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dapat membuka lebih banyak lapangan

kerja dan menurunkan angka pengangguran. Hubungan ini dapat dilihat melalui rasio kesempatan kerja terhadap output serta elastisitas kesempatan kerja dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan pemerataan pendapatan. Dalam kondisi ekonomi yang tumbuh, distribusi pendapatan dapat menjadi lebih merata jika pertumbuhan tersebut diiringi dengan perluasan kesempatan kerja yang memberi akses pendapatan kepada masyarakat secara lebih luas. Tanpa pertumbuhan ekonomi, yang terjadi justru adalah pemerataan kemiskinan, bukan kesejahteraan. Pertumbuhan yang inklusif menjadi kunci untuk menciptakan keadilan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai landasan bagi kemajuan suatu negara di masa depan. Perekonomian dapat diibaratkan seperti manusia yang memerlukan proses panjang untuk mencapai kedewasaan. Pertumbuhan ekonomi menjadi tahapan penting menuju kematangan tersebut, karena negara yang ekonominya mampu tumbuh secara berkelanjutan biasanya memiliki kapasitas untuk melakukan modernisasi. Untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, dibutuhkan tidak hanya tenaga kerja dan sumber daya alam, tetapi juga teknologi yang memadai serta sistem ekonomi dan sosial yang modern. Elemen-elemen seperti pasar, keuntungan, kepemilikan, kepastian hukum, dan demokrasi menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis dan berdaya saing (Sultan, 2023).

Permasalahan kemiskinan juga merupakan masalah yang kompleks, kemiskinan ini muncul karena ketidakadilan atau ketimpangan kebijakan sistem ekonomi bagi masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan ada keterbatasan akses bagi mereka. Kemiskinan juga disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang mereka terima dan akan menimbulkan kemiskinan (Madaliah & Rohmah, 2024). Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Indonesia, data per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 23,85 juta jiwa, yang merupakan capaian terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, terdapat dinamika berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, jumlah penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan, sedangkan di wilayah pedesaan justru menunjukkan penurunan. Secara umum, angka kemiskinan di Indonesia

memperlihatkan tren penurunan dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami lonjakan pada masa pandemi COVID-19. Adapun persentase penduduk miskin pada periode tersebut tercatat sebesar 8,47% dari total populasi nasional (BPS, 2025).

Strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan semata terbukti belum mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan semacam ini justru sering menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana sebagian kelompok masyarakat menikmati kemakmuran, sementara kelompok lainnya tetap berada dalam kondisi miskin dan tertinggal. Ketimpangan tersebut muncul karena asumsi adanya *trickle down effect* yakni anggapan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi akan menetes secara otomatis ke lapisan masyarakat bawah tidak terjadi sebagaimana yang diharapkan dalam konteks pembangunan di Indonesia yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, sektor industri, khususnya industri berskala besar, dianggap sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Pemerintah menaruh harapan besar pada sektor ini untuk mendorong peningkatan produktivitas dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan pembangunan Indonesia sejak awal masa Orde Baru mencerminkan orientasi tersebut, di mana industrialisasi dipandang sebagai jalan utama menuju kemajuan ekonomi (Dewi & Suryadi, 2025).

Kemiskinan di Indonesia masih dalam angka yang relatif tinggi, selama ini Pemerintah Indonesia telah menciptakan program-program untuk mengurangi kemiskinan. Upaya untuk mengurangi kemiskinan terdapat dua strategi yang harus dilakukan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka diberbagai bidang. Dua, memberikan pelatihan atau pemberdayaan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk mencegah kemiskinan yang berkelanjutan. Upaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia ini bertujuan agar berkurangnya masyarakat miskin di negara Indonesia. Salah satu pemberdayaan atau pelatihan dari pemerintah Indonesia sudah mulai terlaksana dari bulan Januari 2025 seperti yang dilaksanakan di Apartemen Transit Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Pemerintah mengambil atau memberdayakan masyarakat dengan kriteria tidak memiliki pekerjaan (*jobless*) dan tidak

mempunyai tempat tinggal yang menetap (*homeless*). Masyarakat ini disebut dengan Keluarga Pemerlu Manfaat (KPM), mereka di data oleh pemerintah dari berbagai daerah ada yang berasal dari Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Pada Apartemen Transit Solokan Jeruk ini terdapat 161 Jiwa yang terdiri dari 43 Kartu Keluarga. Dari 161 Jiwa terdapat penyandang disabilitas, satu disabilitas sensorik dan satu disabilitas fisik.

Pelaksanaan program pemberdayaan pada keluarga pemerlu manfaat diharapkan mampu memperluas akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mendorong partisipasi dalam program wajib belajar 12 tahun, serta menekan angka pekerja anak. Secara keseluruhan, program pemberdayaan dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat membentuk perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan, memutus rantai kemiskinan antar generasi, mendorong kesetaraan gender, serta menurunkan angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan. Melalui upaya tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan keluarga. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, Program Pemberdayaan ini memberikan kesempatan bagi keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan pendidikan (Fasdik) di lingkungan mereka. Cakupan manfaat ini juga diperluas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia guna menjaga tingkat kesejahteraan sosial keluarga kurang mampu didorong agar dapat mengakses dan memanfaatkan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, serta pendampingan.

Berdasarkan minat dan bakat yang telah di data oleh pemerintah yaitu 21 jiwa minat dibidang berjualan, 13 jiwa minat di bidang pengolahan pangan, 4 jiwa minat di bidang kecantikan atau salon dan 8 jiwa minat di bidang menjahit, 3 jiwa minat di bidang ternak, 3 jiwa minat di bidang alat berat, 3 jiwa minat di bidang otomotif, 1 jiwa minat di bidang refleksi dan 2 jiwa berminat di bidang servis elektronik. Sebelum KPM masuk kedalam Apartemen dan melakukan pelatihan mereka sangat amat terkendala dalam modal, mereka tidak memiliki modal untuk

melakukan bisnis atau pekerjaan yang mereka minati. Karena rata-rata pekerjaan mereka ada yang menjadi pemulung, buruh harian, ibu rumah tangga, bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali.

Dalam situasi seperti ini, modal sosial tampaknya menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pemerlu manfaat. Karena modal sosial adalah konsep yang mengacu pada kebiasaan, norma, dan nilai-nilai yang membentuk jaringan sosial yang memungkinkan anggota masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Pierre Bourdieu, teori modal sosial, yang mencakup jaringan, norma, serta kepercayaan sebagai faktor penting dalam mendorong koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan bersama. Pemberdayaan masyarakat dapat tercapai apabila modal sosial tersebut dibangun dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan kolektif, antara lain dalam menekan angka kriminalitas, meningkatkan mutu pendidikan, dan menjaga derajat kesehatan Masyarakat (Bourdieu; Robin & Marchella, 2024).

Dari fenomena dan permasalahan yang terjadi, nampaknya pendekatan teori modal sosial Pierre Bourdieu relevan untuk digunakan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi. Menurut Bourdieu bahwa sumber daya merupakan hasil dari jaringan sosial yang telah terbentuk dan dapat digunakan untuk mendukung kemajuan. Pemanfaatannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan dalam hal kekuasaan maupun status sosial.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penelitian ini perlu dilakukan guna mengetahui dan mengkaji bagaimana program pemberdayaan keluarga pemerlu manfaat ini dapat menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjadi *focus of analysis* yang konkrit. Dengan menggunakan kajian dan teori sosiologi, diharapkan dapat mempertajam pisau analisis terhadap fenomena yang terjadi secara sistematis. Dalam hal ini, Peneliti menekankan pada konsep modal sosial Pierre Bourdieu. Hal ini guna memperjelas lokus dan kajian penelitian tentang optimalisasi program pemberdayaan keluarga pemerlu manfaat

dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di apartemen transit Solokan Jeruk melalui pemberdayaan yang dimiliki secara sistematis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Relasi Sosial keluarga pemerlu manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Apartemen Transit Solokan Jeruk?
2. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan program pemberdayaan keluarga pemerlu manfaat di Apartemen Transit Solokan Jeruk?
3. Bagaimana keluarga pemerlu manfaat di Apartemen Transit Solokan Jeruk menjalankan kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui relasi sosial keluarga pemerlu manfaat di Apartemen Transit Solokan Jeruk.
2. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan pemberdayaan pada keluarga pemerlu manfaat di Apartemen Transit Solokan Jeruk.
3. Untuk mengetahui keluarga pemerlu manfaat menjalankan kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah di Apartemen Transit Solokan Jeruk.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan temuan pada penelitian ini akan memiliki manfaat akademik dan praktis di masa depan, antara lain sebagai berikut.

1. Secara Ilmiah
 - a) Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan riset bagi peneliti lain mengenai pemberdayaan ekonomi pada keluarga pemerlu manfaat di Apartemen Transit Solokan Jeruk dalam meningkatkan kesejahteraan.

- b) Peneliti ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi riset peneliti lain mengenai kontribusi pemberdayaan ekonomi pada keluarga pemerlu manfaat di Apartemen Transit Solokan Jeruk.

2. Secara Sosial

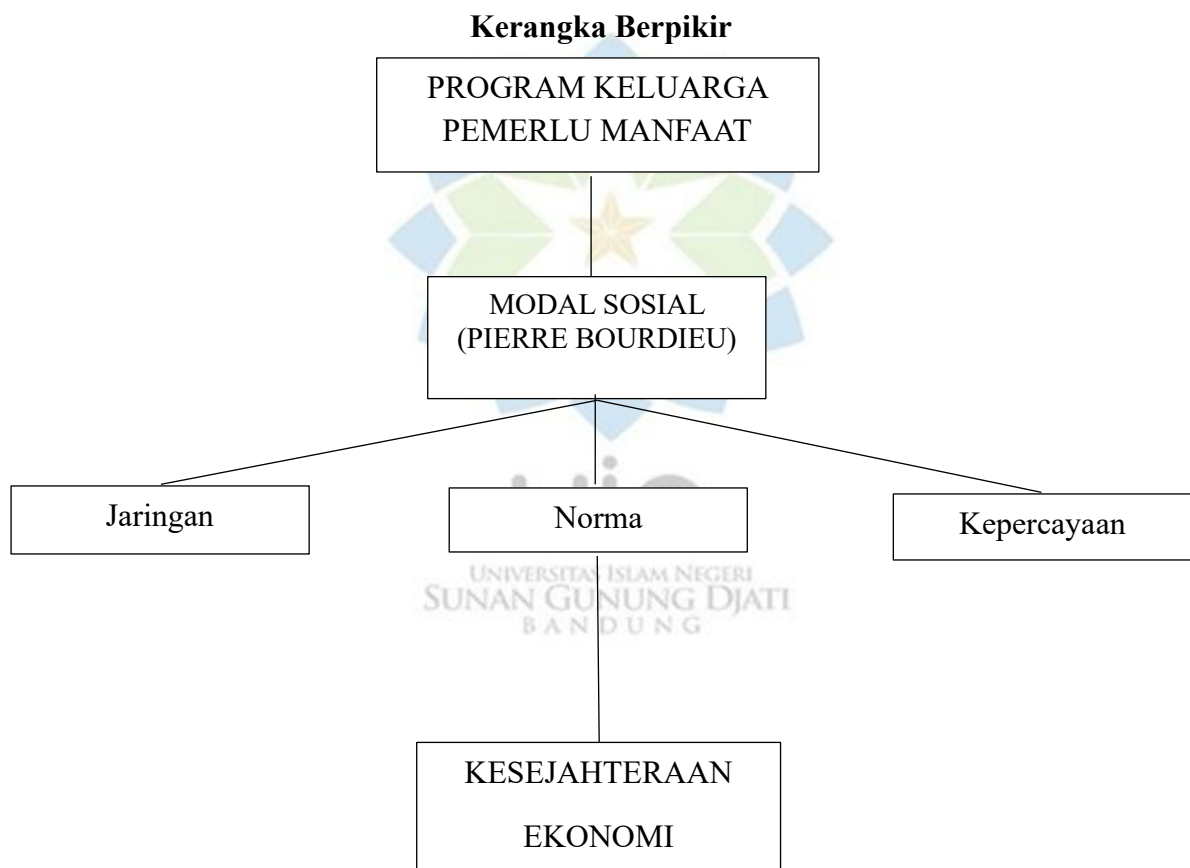
- a) Peneliti ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat, khususnya keluarga pemerlu manfaat mengenai pemberdayaan ekonomi di Apartemen Transit Solokan Jeruk.
- b) Peneliti ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat, khususnya keluarga pemerlu manfaat mengenai kontribusi pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan di Apartemen Transit Solokan Jeruk.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan variabel dan konsep utama yang menjadi landasan analisis serta fokus kajian peneliti. Dalam konteks ini, pemberdayaan berperan sebagai konsep sentral yang tidak hanya dipahami dari sisi teoritis, tetapi juga harus ditelusuri penerapannya dalam ranah praktis (Anshori, 2020). Untuk memperdalam analisis terhadap pemberdayaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Modal Sosial yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu sebagai pisau analisis tambahan.

Menurut Bourdieu, modal sosial mencakup tiga komponen utama, yaitu jaringan (*network*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*). Ketiganya saling berkaitan dan menjadi dasar dalam membentuk hubungan sosial yang produktif. Jaringan menggambarkan keterikatan antarindividu dalam suatu komunitas yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi maupun dukungan. Norma berfungsi sebagai pedoman perilaku yang menjaga keteraturan dalam interaksi sosial, sedangkan kepercayaan menjadi pondasi yang memperkuat solidaritas dan kerjasama antaranggota masyarakat. Dengan menggunakan kerangka berpikir ini, penelitian berupaya memahami bagaimana proses pemberdayaan dapat tumbuh dan berkelanjutan melalui kekuatan modal sosial yang ada di masyarakat.

Ketiga unsur ini akan menjadi pegangan peneliti dalam menentukan bahkan menetapkan informan, data, dan batas kejenuhan data untuk peneliti analisis. Setelah itu, peneliti dapat meninjau bagaimana kesejahteraan yang dapat dibangun dan terwujud Ketika unsur-unsur pemberdayaan tersebut termanifestasikan oleh keluarga pemerlu manfaat di Apartemen Transit Solokan Jeruk. Oleh karena itu, informasi dan data yang lengkap mengenai ketiga unsur tersebut dapat menjelaskan secara rinci bagaimana modal sosial itu berkontribusi secara nyata. Untuk lebih detailnya mengenai kerangka atau peta konsep penelitian ini, dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Gambar 1.1

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga pemerlu manfaat dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori modal sosial yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Karena menurut Bourdieu, modal sosial merupakan bentuk sumber daya yang dimiliki individu maupun kelompok yang berasal dari jaringan hubungan sosial, tingkat kepercayaan, serta norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, modal sosial berperan penting dalam menentukan sejauh mana keluarga pemerlu manfaat dapat memanfaatkan peluang, memperoleh dukungan, serta mengakses informasi yang diperlukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi mereka.

